

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam suatu perusahaan untuk melaksanakan kegiatan operasinya, secara periodik menyiapkan laporan keuangan untuk pihak-pihak yang berkepentingan seperti pemegang saham, investor, dan pemerintah. Laporan keuangan merupakan ringkasan dari proses pencatatan transaksi-transaksi keuangan yang terjadi selama satu periode. Salah satu tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai kondisi keuangan perusahaan kepada para pemakai laporan keuangan.

Laporan laba rugi yang menjadi salah satu bagian dari laporan keuangan berisi kinerja perusahaan dalam satu periode. Informasi laba dapat dijadikan panduan dalam melakukan investasi yang membantu investor atau pihak lain dalam menilai kemampuan menghasilkan laba perusahaan dimasa yang akan datang. Secara umum, makin besar labanya, kinerja sebuah perusahaan dinilai makin baik sehingga perusahaan akan lebih diminati investor. Namun, berdasarkan kenyataan yang ada seringkali perhatian pengguna laporan keuangan hanya ditujukan kepada informasi laba, tanpa memperhatikan bagaimana laba tersebut dihasilkan. Hal ini mendorong manajemen perusahaan untuk melakukan beberapa tindakan yang disebut manajemen laba (*earning management*).

Akhir-akhir ini manajemen laba menjadi sebuah fenomena umum yang terjadi di sejumlah perusahaan. Beberapa kasus perusahaan yang terkait manajemen laba seperti yang dikemukakan oleh Boediono (2005), PT. Kimia Farma pada tahun 2001 melaporkan adanya laba bersih sebesar Rp 132 milyar yang telah diaudit, namun Kementerian BUMN dan Bapepam menilai bahwa laba bersih tersebut terlalu besar dan mengandung unsur rekayasa karena saat dilakukan audit ulang pada laporan keuangan yang baru, keuntungan yang disajikan hanya sebesar Rp 99,56 miliar, atau lebih rendah sebesar Rp 32,6 milyar,

atau 24,7% dari laba awal yang dilaporkan.

Bank Lippo Tbk. pada Tahun 2002 yang melaporkan kerugian yang tidak terjadi, kerugian bank itu direkayasa melalui 2 cara yakni menurunkan nilai aset melalui valuasi yang dirancang sangat merugikan bank dan transfer aset kepada pihak terkait untuk menciptakan kerugian di pihak bank, tetapi menguntungkan pemilik lama (Hartomo, 2003).

Selanjutnya, kasus IM3 yang termasuk dalam PT. Indosat diduga melakukan penggelapan pajak dengan cara memanipulasi Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) ke kantor pajak untuk tahun buku Desember 2001 dan Desember 2002. Jika pajak masukan lebih besar dari pajak keluaran, dapat direstitusi atau ditarik kembali. Karena itu, IM3 melakukan restitusi sebesar Rp 65,7 miliar. Sebanyak 750 penanam modal asing (PMA) terindikasi tidak membayar pajak dengan cara melaporkan rugi selama lima tahun terakhir secara berturut-turut.

Dari kasus-kasus di atas terindikasi bahwa dalam perusahaan tersebut terjadi tindak manajemen laba dengan memanfaatkan kebijakan akuntansi. Dalam konteks manajemen laba, suatu badan usaha akan makin termotivasi untuk berperilaku kreatif dalam memanfaatkan teknik dan kebijakan akuntansi ketika badan usaha itu memiliki keyakinan akan menerima imbalan atas tindakannya tersebut.

Manajemen laba secara umum dibagi menjadi dua kategori, yaitu manajemen laba melalui kebijakan akuntansi dan manajemen laba melalui aktivitas riil. Manajemen laba melalui kebijakan akuntansi merujuk pada permainan angka laba yang dilakukan menggunakan teknik dan kebijakan akuntansi. Sementara manajemen laba melalui aktivitas riil merujuk pada permainan angka laba yang dilakukan melalui aktivitas-aktivitas yang berasal dari kegiatan bisnis normal atau yang berhubungan dengan kegiatan operasional, misalnya menunda kegiatan promosi produk atau mempercepat penjualan dengan pemberian diskon besar-besaran.

Menurut teori keagenan yang dikemukakan oleh Jensen and Meckling (1976), tindak manajemen

laba yang terjadi karena perbedaan kepentingan antara *principal* dan *agent* dapat dikurangi atau bahkan dihilangkan dengan tata kelola perusahaan yang baik atau lebih dikenal dengan *good corporate governance* (GCG). GCG dalam arti luas yaitu suatu struktur yang mengatur pola hubungan harmonis tentang peran dewan komisaris, direksi, pemegang saham dan para *stakeholder* lainnya.

Penerapan *corporate governance* secara konsisten yang berprinsip pada keadilan, transparansi, akuntabilitas, dan pertanggungjawaban terbukti dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan. Dengan adanya prinsip *good corporate governance* tersebut diharapkan dapat menjadi penghambat aktivitas rekayasa kinerja yang mengakibatkan laporan keuangan tidak menggambarkan nilai fundamental perusahaan.

Pada dasarnya dalam pengelolaan perusahaan yang baik, ada mekanisme yang mendorong terciptanya *good corporate governance* yang telah diatur oleh Bapepam-LK yaitu dewan komisaris independen dan komite audit. Keberadaan komisaris independen telah ditetapkan dalam Undang-undang perseroan terbatas No. 40 Tahun 2007 dengan jumlah komisaris independen 1 (satu) orang atau lebih. Sedangkan untuk komite audit diatur dalam Kep-29/PM/2004 yang mewajibkan perusahaan memiliki komite audit dengan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang. Bila dalam suatu perusahaan, tidak terdapat komisaris independen dan komite audit, maka perusahaan tersebut berhak menerima sanksi.

Selain dewan komisaris independen dan komite audit, mekanisme lain yang dapat mendorong terciptanya *good corporate governance* yaitu kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional. Kepemilikan manajerial merupakan saham perusahaan yang dimiliki oleh manajemen perusahaan. Sedangkan kepemilikan institusional merupakan saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi atau lembaga.

Dengan keberadaan dewan komisaris independen, komite audit, kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional diharapkan mampu menurunkan tindak manajemen laba. Beberapa penelitian telah dilakukan mengenai mekanisme *corporate governance* yang mempengaruhi manajemen laba dan

ditemukan hasil yang beragam.

Penelitian Nasution dan Setiawan (2007), untuk mengetahui pengaruh *corporate governance* terhadap tindak manajemen laba yang terjadi di perusahaan perbankan. Ditemukan bahwa secara individual, komposisi dewan komisaris dan komite audit berpengaruh negatif signifikan terhadap manajemen laba. Artinya semakin besar komposisi dewan komisaris dan komite audit maka dapat mengurangi manajemen laba dalam perusahaan.

Chtourou *et al.* (2001) menemukan bahwa komisaris independen dan komite audit berpengaruh secara signifikan terhadap manajemen laba. Sehingga dengan keberadaan komisaris independen dan komite audit bisa menurunkan praktik manajemen laba.

Wedari (2004) menemukan bahwa pengaruh mekanisme *corporate governance*, dalam hal ini proporsi dewan komisaris dan keberadaan komite audit berpengaruh secara signifikan dengan aktivitas manajemen laba. Dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa proporsi dewan komisaris dan keberadaan komite audit mampu mengurangi aktivitas manajemen laba.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, dapat ditarik rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

- 1) Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap praktik manajemen laba?
- 2) Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap praktik manajemen laba?
- 3) Apakah dewan komisaris independen berpengaruh terhadap praktik manajemen laba?
- 4) Apakah komite audit berpengaruh terhadap praktik manajemen laba?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan dari penelitian ini adalah:

- 1) Menguji pengaruh kepemilikan manajerial terhadap praktik manajemen laba.
- 2) Menguji pengaruh kepemilikan institusional terhadap praktik manajemen laba.
- 3) Menguji pengaruh dewan komisaris independen terhadap praktik manajemen laba.
- 4) Menguji pengaruh komite audit terhadap praktik manajemen laba.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu akuntansi, khususnya yang berkaitan dengan pemahaman tentang *good corporate governance* dalam suatu perusahaan.

1.4.2 Manfaat Praktis

Dari segi praktis hasil penelitian ini diharapkan menjadi referensi atau bahan pertimbangan bagi pihak yang berkepentingan yaitu pada perusahaan-perusahaan yang *go public* di bursa efek Indonesia dalam menerapkan *good corporate governance* sesuai ketentuan yang ada, sehingga dapat meminimalisirkan manajemen laba.